

PEMBERDAYAAN UMKM DI SENTRA INDUSTRI KECIL TERITIP KOTA BALIKPAPAN

Desta Anisa¹, Niken Nurmiyati^{2*}, Paisal Akbar³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Indonesia.

*Korespondensi: nikennurmiyati@fisip.unmul.ac.id

Citation (APA):

Anisa, D., Nurmiyati, N., & Akbar, P. (2025). Pemberdayaan UMKM di Sentra Industri Kecil Teritip Kota Balikpapan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 477–492. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.5119>

Email Authors:

anisadesta079@gmail.com
nikennurmiyati@fisip.unmul.ac.id
paisalakbar@fisip.unmul.ac.id

Submitted: 27 November, 2025

Accepted: 13 Desember, 2025

Published: 25 Desember, 2025

Copyright © 2025 Desta Anisa, Niken Nurmiyati, Paisal Akbar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Pembangunan Sentra Industri Kecil Teritip di Kota Balikpapan masih menghadapi sejumlah persoalan, khususnya terkait optimalisasi pemberdayaan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengembangan sentra industri. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: (1) peningkatan kapasitas pelaku usaha telah berjalan melalui pelatihan dan penyediaan fasilitas, tetapi belum sepenuhnya merata bagi UMKM skala mikro; (2) partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sentra cukup aktif, namun masih terkendala dalam aspek pemasaran dan inovasi produk; dan (3) kemandirian ekonomi pelaku usaha mengalami perkembangan positif, meskipun keberlanjutan sistem sewa bangunan dan pemanfaatan fasilitas belum berjalan optimal. Kesimpulannya, pengembangan Sentra Industri Kecil Teritip memerlukan penguatan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta evaluasi kebijakan sewa untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Kata kunci: Sentra Industri Kecil; Pemberdayaan; Pengembangan Ekonomi Lokal

ABSTRACT

The development of the Teritip Small Industrial Center in Balikpapan continues to face several challenges, particularly in optimizing the empowerment of business actors. This study aims to analyze the implementation of industrial center development. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal three key points: (1) capacity building for business actors has been carried out through training and facility provision, yet it has not been evenly accessed by micro-scale enterprises; (2) community participation in utilizing the industrial center is relatively active, although marketing and product innovation remain persistent obstacles; and (3) the economic independence of business actors has shown positive progress, despite issues related to the sustainability of building rental schemes and the effective use of available facilities. In conclusion, the development of the Teritip Small Industrial Center requires strengthened management, improved human resource quality, and a review of rental policies to support sustainable local economic empowerment.

Keywords: Small Industrial Center; Empowerment; Local Economic Development

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang menyerap hampir 97% tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan jumlah lebih dari 64 juta unit usaha (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025). Meskipun kontribusinya besar, sebagian besar UMKM masih menghadapi tantangan dalam akses permodalan, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi, yang berdampak pada rendahnya daya saing di era globalisasi. Oleh karena itu, pemerintah mendorong strategi pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM sebagai instrumen penguatan perekonomian daerah sekaligus peningkatan daya saing nasional.

Pada tingkat daerah, strategi pemberdayaan UMKM diwujudkan melalui pembentukan sentra industri kecil dan menengah di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Sentra industri diarahkan sebagai pusat peningkatan kapasitas pelaku UMKM, penyediaan fasilitas produksi, serta pengembangan ekonomi lokal. Mengingat Kalimantan Timur merupakan wilayah yang menaungi berbagai industri besar, daerah ini diharapkan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah (Dinas Perindustrian Kalimantan Timur, 2019). Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda memiliki jumlah Industri Mikro dan Kecil (IMK) tertinggi, disusul oleh Kota Balikpapan yang juga memberikan kontribusi signifikan. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan pemberdayaan UMKM sebagai instrumen pembangunan daerah.

Upaya pemberdayaan tersebut sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip (Republik Indonesia, 2019). Kebijakan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki kendali atas kepentingan dan masa depannya, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan secara berkelanjutan melalui pembentukan struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang. Secara teoritis, konsep pemberdayaan telah lama menjadi bagian penting dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan dipahami sebagai proses peningkatan harkat dan martabat kelompok masyarakat yang berada pada kondisi kurang berdaya agar mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing melalui penguatan keterampilan, pengembangan kapasitas, serta pemahaman terhadap sistem sosial dan ekonomi yang ada (Dina et al., 2023). Selain itu, konsep pemberdayaan juga dapat memicu produktivitas untuk meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk, baik kelompok masyarakat secara umum maupun kelompok perempuan (Nurmiyati et al., 2020; Wahid et al., 2024).

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Jim Ife yang memandang pemberdayaan sebagai proses yang menekankan pada peningkatan kapasitas, partisipasi masyarakat dan kemandirian ekonomi. Kutanegara (2017) menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya memfasilitasi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini sejalan oleh penelitian yang dilakukan oleh Voges et al. (2016) menambahkan bahwa pemberdayaan harus mendorong masyarakat agar menjadi lebih mandiri, dan mampu menentukan pilihan hidup secara berkelanjutan. Kartasmita juga menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai sosial, dengan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, berinisiatif, dan mandiri dalam mengelola potensi yang dimiliki (Suaib., & Zulhijjah, 2024).

Dalam konteks penelitian ini, teori pemberdayaan Jim Ife digunakan sebagai kerangka analisis yang menekankan tiga dimensi utama. Pertama, peningkatan kapasitas mencakup pelatihan keterampilan, pengembangan manajemen usaha, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi (Setyawan et al., 2025). Peningkatan kapasitas merupakan proses penguatan kemampuan individu, kelembagaan, dan jaringan sosial untuk mengelola sumber daya secara efektif sehingga pelaku UMKM mampu mengendalikan masa depan ekonominya (Nurhayati et al., 2023). Kedua, partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama pemberdayaan, di mana pelaku UMKM tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bertindak sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ekonomi lokal (Dippoprameswari & Pujiyanto, 2024; Nashuha, 2025). Ketiga, kemandirian ekonomi yang dipahami sebagai

kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya lokal secara optimal tanpa ketergantungan yang tinggi pada pihak luar (Setyawan et al., 2025).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriyani et al., (2025) menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 12 Tahun 2019 pada dasarnya telah dijalankan, namun belum terlaksana secara optimal. Peraturan tersebut mengamanatkan adanya evaluasi pemanfaatan rumah produksi dan fasilitas pendukung setiap dua tahun. Namun, sejak peraturan tersebut diberlakukan hingga saat ini, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Sentra Industri Kecil (UPTD SIK) belum memiliki laporan evaluasi maupun dokumentasi progres perkembangan pelaku usaha sebagai bentuk implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam pengelolaan SIKT adalah rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Sejumlah pelaku usaha masih melakukan produksi di rumah, sementara sebagian UMKM belum memenuhi standar produksi yang ditetapkan untuk beroperasi di kawasan sentra. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemberdayaan yang dirancang pemerintah dengan kebutuhan, kapasitas, dan perilaku pelaku UMKM di lapangan. Minimnya pemanfaatan fasilitas sentra tersebut menjadi celah penelitian (*research gap*), mengingat bahwa terbatasnya kajian yang secara spesifik menilai efektivitas implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM melalui pengelolaan SIKT, khususnya pada aspek peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian pelaku usaha.

Pengelolaan SIKT merupakan kewenangan UPTD SIK yang bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan aktivitas sentra sesuai dengan Perwali Nomor 12 tahun 2019. Tujuan pengelolaan SIKT antara lain, (1) Menyediakan sarana dan prasarana bagi pelaku usaha industri kecil (2) meningkatkan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha industri kecil, (3) meningkatkan daya saing produk agar sesuai dengan standar industri, (4) mendorong tumbuhnya industri kecil modern, (5) menjadikan kawasan sentra sebagai destinasi wisata baru dan pusat oleh-oleh (Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa SIKT tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Balikpapan (Adriyanto & Nurjanah, 2016; Arifin, 2021).

SIKT merupakan salah satu implementasi nyata kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kota Balikpapan yang berfokus pada pengembangan industri berbasis hasil pertanian dan kelautan. Dalam proses pembentukannya, sentra dapat terbentuk melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan alami dan pendekatan artifisial. Pendekatan alami muncul karena adanya ciri khas tertentu yang menonjol pada suatu wilayah yang mendorong masyarakat mengembangkan usaha sejenis secara turun-temurun, sebagaimana terlihat pada Kampung Pathuk di Yogyakarta yang dikenal sebagai sentra produksi bakpia. Sementara itu, pendekatan artifisial terbentuk karena adanya kegiatan ekonomi yang besar dan kemudian menciptakan kumpulan-kumpulan pengusaha dalam satu kawasan industri yang telah disiapkan (Setiawati, 2023). Dalam hal ini, SIKT termasuk ke dalam sentra artifisial karena sentra ini dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui dinas terkait untuk memusatkan industri skala kecil dan menengahkan dengan dukungan fasilitas dan prasarana penunjang.

Pembangunan sentra industri dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat apabila Pemerintah Daerah sudah menyiapkan lahan dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kawasan Industri, khususnya Pasal 51 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang (Republik Indonesia, 2024). Infrastruktur industri mencakup ketersediaan akses jalan, energi listrik, sumber air, serta jaringan komunikasi. Sementara itu, infrastruktur penunjang meliputi rumah produksi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, sarana ibadah, sarana kesehatan, fasilitas olahraga, fasilitas komersial, fasilitas penelitian dan pengembangan, pemadam kebakaran, tempat pembuangan sampah serta pos keamanan (Safira, 2019).

SIKT mulai dibangun pada tahun 2017 melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perindustrian dan dirancang memiliki 48 unit rumah produksi di atas lahan seluas 6,4 hektar. Namun hingga saat ini, realisasi pembangunan baru mencapai sekitar 50 persen atau sebanyak 24 unit rumah produksi (Diskominfo, 2021). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dari 21 UMKM yang terdaftar sebagai pengguna fasilitas sentra, hanya sekitar 10-15 UMKM yang aktif memproduksi setiap hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan praktik implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas implementasi kebijakan pemberdayaan melalui pengelolaan SIKT di Kota Balikpapan dengan meninjau aspek peningkatan kapasitas, partisipasi masyarakat, dan kemandirian ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjektif penelitian, konteks sosial, serta dinamika kebijakan yang berlangsung dalam pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT) di Kota Balikpapan. Menurut (Sugiyono, 2013) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang menekankan objek alamiah sebagai fokus kajian, dengan peneliti sebagai instrumen kunci serta pengumpulan data dilakukan secara triangulasi.

Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife sebagai kerangka analisis, yang menekankan pada tiga dimensi yaitu peningkatan kapasitas, partisipasi masyarakat, dan kemandirian perekonomian masyarakat. Ketiga dimensi digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip dalam pemberdayaan UMKM di Kota Balikpapan. Data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: (1) Wawancara mendalam dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sentra Industri Kecil Teritip dan Pelaku UMKM di Sentra Industri Kecil Teritip; (2) Observasi langsung terhadap aktivitas, fasilitas, dan kondisi operasional di Sentra Industri Kecil Teritip; serta (3) Data sekunder yang diperoleh melalui telaah dokumen pendukung, seperti Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, serta berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Zulfirman, 2022). Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan dan menyederhanakan hasil wawancara, obeservasi, dan dokumentas lapangan; penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan proses analisis; dan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan makna data yang telah tervalidasi. Penelitian ini dilakukan di Sentra Industri Kecil Teritip yang berlokasi di Jalan Teritip Laut RT 42, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Lokasi penelitian dipilih secara purposif, dengan pertimbangan bahwa SIKT merupakan sentra yang dibangun secara khusus oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Subhaktiyasa, 2024), serta karena lokasinya yang relatif jauh dari pusat kota, sehingga menarik untuk dikaji dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada 16 September 2025 dengan Bapak Syahrul selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sentra Industri Kecil Teritip, Pembangunan Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT) bertujuan untuk mengakomodasi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Balikpapan yang telah berkembang dan memiliki kapasitas produksi yang relatif besar, namun mengalami keterbatasan ruang produksi. Infroman menjelaskan bahwa UKM yang difasilitasi di SIKT merupakan usaha yang telah berjalan dan membutuhkan sarana produksi yang representatif dibandingkan produksi berbasis rumah tangga. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syahrul:

“SIKT ini diperuntukkan bagi UKM yang sudah berjalan dan kapasitas produksinya cukup besar, tetapi memiliki terbatasan tempat. Kami sediakan tempat agar kegiatan produksi dapat berjalan lebih optimal dibandingkan jika dilakukan di rumah.”

Sebagai dasar pemahaman terhadap kondisi objektif pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Provinsi Kalimantan Timur, penting untuk melihat bagaimana sebaran pelaku Industri Mikro dan Kecil (IMK) pada setiap kabupaten dan kota. Data ini memberikan gambaran mengenai potensi wilayah, kosentrasi pelaku usaha, dan serta kapasitas daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Berikut disajikan sebaran usaha dan persentase pekerja IMK di Provinsi di Kalimantan Timur.

Tabel I. Sebaran Usaha dan Persentase Pekerja Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Sebaran Usaha IMK	Persentase Pekerja IMK (%)
Kutai Kartanegara	19,69	20,93%
Samarinda	19,31	19,95%
Balikpapan	13,35	14,23%
Paser	9,65	8,07%
Penajam Paser Utara	9,49	8,41%
Bontang	9,16	8,71%
Berau	8,52	8,51%
Kutai Barat	6,99	7,60%
Kutai Timur	3,82	3,60%
Mahakam Ulu	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2024)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada 16 September 2025 dengan Bapak Syahrul selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sentra Industri Kecil Teritip, dari 24 rumah produksi yang tersedia di Sentra Industri Kecil Teritip, terdapat 21 pelaku UMKM yang terdaftar sebagai pengguna fasilitas. Namun demikian, hanya sekitar 10-15 pelaku usaha yang aktif memproduksi setiap harinya. Fasilitas fisik yang tersedia saat ini meliputi rumah produksi, kantor UPTD, instalasi air bersih (PDAM), jaringan listrik, akses jalan, gudang, dan *cold storage*. Ketersediaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur dasar SIKT telah memadai untuk mendukung kegiatan produksi. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal. Sebagian pelaku usaha, khususnya UMKM usaha mikro, masih memilih melakukan proses produksi dari rumah karena kapasitas produksinya yang relatif kecil sehingga belum siap untuk memanfaatkan fasilitas sentra secara penuh. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa:

“Dari 24 rumah produksi yang tersedia, baru terdapat 21 UMKM terdaftar, dan hanya sekitar 10-15 UMKM yang aktif memproduksi setiap harinya.”

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai jenis usaha yang beroperasi di SIKT, diperlukan pemetaan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM binaan. Klasifikasi ini penting untuk menunjukkan sektor dominan yang difasilitasi oleh pemerintah, terutama karena SIKT berfokus pada pengolahan hasil pertanian dan kelautan. Berikut disajikan kategori produk UMKM yang memanfaatkan fasilitas SIKT:

Tabel II. Kategori Produk UMKM di Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT) di Kota Balikpapan

Kode	Nama Usaha	Pemilik Usaha	Jenis Produk	Harga
A-1	Bamboo Alley	Wiwit Ardianto	Abon Cakalang 140 Gr, Kripik Ikan 75 Gr	Rp 17.000
A-2	Wadah Djajan	Hanfia	Opak (Bumbu/Original) 150 Gr	Rp 10.000
A-3	Nurul Snack	Elin Nurkomah	Rengginang (Original, Ketan Putih, Original Ketan Hitam, Balado). Rumput Laut (Rumput Laut Coklat dan Kepiting 75 Gram dan 150 Gram)	Rp 22.000
A-4	Waroeng Geboy	Rina Kartika Dewi	Singkong Cryspi Geboy/Frozen. Otak-Otak Ikan, Mantau Frozen, Brownies Kering Mini, Singkong Sambal Terasi, Mantau Isi Ayam Kecap 500 Gram	Rp 15.000
A-5	Waroeng Geboy	Rina Kartika Dewi	Tahu Bakso	Rp 15.000
A-6	Waroeng Geboy	Rina Kartika Dewi	Otak-Otak Ikan	Rp 15.000
A-7	Zetiga	Sriani	Amplang Agyana (Kepiting, Ikan Tenggiri, Jamur) 90 Gr Dan 150 Gr	Rp 18.000
A-8	Endang Produet	Endang Tri Murni	Stik Kepiting (Rumput Laut, Vegetarian) 100 Gr	Rp 15.000
A-9	Widhi Sea Food	Widhi Sukoharjo	Renyah Kepiting 150 Gr	Rp 20.000
A-10	Deli Coffie	Mahmud Yusuf	Kopi Sepinggan (Kopi Lanang, Tingtong, Lumak, Liberica, Wine, Excelsa, Teh Daun Kopi) 100 Gr	Rp 35.000
A-11	MaXimalfood	Nany Achmad SE	Soes Crispy (Rasa Coklat, Keju, Tiramishu, Cappuccino. Strawberry,	Rp 20.000

			Anggur, Green Tea, Kepiting, Udang, Cumi-Cumi) 75 Gr, 100 Gr	
A-12	Eang Wangsa	Reinca Wangsa Gunasih	Amplang ABG (Ikan, Rumput Laut, Abon Ikan) 100 Gr	Rp 15.000
A-13	Taganang	Nuning Hermina	Sambal Kepiting 250 Gr	Rp 45.000
A-14	BDS Snack	Sri Astuti Wijaya	Kress Singkong (Keju, Sapi Panggang, Balado, Original) 50 Gr	Rp 15.000
A-15	BDS Snack	Sri Astuti Wijaya	Pantick Ikan 80 Gr	Rp 15.000
A-16	BDS Snack	Sri Astuti Wijaya	Ciplang (Extra Pedas, Lada Hitam) 80 Gr	Rp 15.000
B-1	BDS Snack	Sri Astuti Wijaya	Amplang / Kuku Macan (Ikan, Kepiting) 180 Gr	Rp 28.000
B-2	BDS Snack	Sri Astuti Wijaya	Abon Kepiting 80 Gr	Rp 40.000
B-3	Athila Snack	Ernawati	The Opak Rasa Balado 120 Gr	Rp 10.000
B-4	Athila Snack	Ernawati	Amplang RAZ'Q (Amplang Ikan, Amplang Ayam) 65 Gr	Rp 15.000
B-5	Berlian	Wigiyati	Amplang Berlian (Ikan Tenggiri, Ikan Pipih, Kepiting) 90 Gr	Rp 10.000
B-6	Hatapan	Dhliya.a	Amplang Hatapan (Ikan, Kepiting, Tenggiri) 50 Gr, 80 Gr, 150 Gr, 500 Gr, 1 Kg	Rp 15.000
B-7	Shifodji Mandiri Food	Hj. Nursia. SE, M.Pd	Shifodji Rasa Kepiting, Udang, Ikan Dan Rumput Laut 0.05 Gr, 150 Gr, 180 Gr, 500 Gr	Rp 10.000
B-8	Dapur Sendy	Sendy Eka Sari	Pepes Tuna Daun Singkong Manggar 400 Gr, Sambelado Kepiting	Rp110.000 Rp 30.000
B-9	Shifodji Mandiri Food	Hj. Nursia. SE, M.Pd	Abon Kepiting dan Abon Udang Rasa Kepiting, Udang 0.05 gr	Rp 20.000
B-10	Shifodji Mandiri Food	Hj. Nursia. SE, M.Pd	Kerupuk Kepiting, Kerupuk Udang dan Cimi-Cimi Kepiting / Udang Rasa Kepiting dan Udang 180 Gr	Rp 20.000
B-11	Shifodji Mandiri Food	Hj. Nursia. SE, M.Pd	Stik Udang, Ikan, Kepiting dan Rumput Laut Rasa Kepiting dan Rasa Udang 150 Gr	Rp 20.000
B-12	BDS Snack	Sri Astuti Wijaya	Stik Cumi Kepiting Udang	Rp 20.000
B-13	Shifodji Mandiri Food	Hj. Nursia. SE, M.Pd	Amplang Ukuran Sedang Rasa Udang, Kepiting, Ikan dan Rumput Laut 200 Gr	Rp 25.000
B-14	Shifodji Mandiri Food	Hj. Nursia. SE, M.Pd	Kerupuk Kepiting & Udang, Cimi-Cimi 7 Udang Rasa Kepiting dan Rasa Udang 500 Gr	Rp 45.000
B-15	BDS Snack	Sri Astuti Wijaya	Cipalang Kepiting Rumput Laut, Cipalang Rasa Kepiting, Abon Ikan Barakuda, Abon Kepiting, Kripik Pisang	Rp 15.000 Rp 15.000 Rp 35.000 Rp 35.000 Rp 15.000
B-16	Shifodji Mandiri Food	Hj. Nursia. SE, M.Pd	Amplang Jumbo Rasa Kepiting, Udang, Ikan 380 Gr	Rp 45.000

C-1	Deli Coffe	Nasaruddin Hamid	Kopi Balikpapan	Rp 35.000
C-2	Steak Rumput Laut	Dewi A.	Brownies Stick Kepiting, Srick Keju 200 Gr	Rp 25.000
C-3	Kopi Da' Jay Nusantara	Suci Wirastama	Amplang Koi, Bawang Dayak	Rp 15.000
C-4	Cireng Crispy Cip Icip Olala	Hj. Murni Marlina, SE	Cireng Crispy Cip Icip Olala (Original, Bawang, Ikan Tuna) 500 gr	Rp 18.000
C-5	Taganang	Nuning Hermina	Abon Kepiting 100 Gr, Sambal Kepiting, Mantau Balikpapan	Rp 50.000
C-6	Yoi Seafood	Fadli	Kepiting Frozen	-
C-7	Eeng Wangsa	Rainca Wangsa Gunasih	Sambal Ikan Asin Bambang, Mocaf Roll, Siomay Ikan Rumput Laut, Kacang Penja, Ladrang Majubi, DII Ikan Rumput Laut, Asing Gurih, Manis Renyah 170ml, 50gr, 80gr	Rp 15.000
C-8	Hatapan	Dahliya. A	- Amplang - Abon Ikan Tongkol	Rp 15.000 Rp 12.000

Sumber: (Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, 2023)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa produk UMKM yang beroperasi di Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT) didominasi oleh olahan hasil laut seperti amplang ikan, abon kepiting, sambal kepiting, dan berbagai jenis snack berbahan dasar ikan maupun rumput laut. Sebagian kecil UMKM memproduksi olahan hasil pertanian, seperti singkong, kopi, dan jamur. Hal ini menunjukkan bahwa karakter sentra sesuai dengan fokus pembinaannya, yakni pengembangan industri olahan hasil pertanian dan kelautan. Selain itu, data pada tabel juga memperlihatkan bahwa sebagian besar UMKM menghasilkan variasi produk dalam jumlah terbatas, sedangkan beberapa pelaku usaha tertentu memiliki jumlah produk yang lebih beragam.

Keragaman jumlah dan jenis produk tersebut mencerminkan perbedaan kapasitas produksi di antara pelaku UMKM. Salah satu UMKM dengan kapasitas produksi yang relatif besar adalah BDS Snack milik ibu Sri Astuti Wijaya (Bu Tuti). Sebelumnya direlokasi ke SIKT, Bu Tuti telah menekuni usaha olahan hasil ikan beroperasi sejak 2004 hingga 1 Juli 2023 di TPI Manggar (Alexander, 2024). Setelah menepati SIKT, usahanya mendapatkan pembinaan, pelatihan, serta dukungan peralatan produksi seperti *cold storage* dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dengan omzet mencapai sekitar Rp 150 juta per bulan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Tuti menyatakan bahwa:

“Sejak ditempatkan di sentra ini, saya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mulai dari jumlah produksi hingga pendapatan yang mencapai sekitar 150 juta perbulan. Sebelumnya saya hanya menjual olahan hasil ikan di TPI Manggar, kini produk yang dihasilkan lebih beragam berbagai seperti amplang, abon, hingga kripik.”

Temuan ini menunjukkan bahwa fasilitas SIKT cenderung lebih optimal dimanfaatkan oleh UMKM yang telah memiliki pengalaman usaha dan kapasitas produksi yang relatif mapan. Sebaiknya, UMKM skala mikro masih menghadapi keterbatasan dalam memanfaatkan fasilitas sentra secara optimal, baik dari segi kapasitas produksi maupun kesiapan sumber daya.

Peningkatan Kapasitas

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, peningkatan kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga penguatan ekonomi lokal dan kemandirian masyarakat. Peningkatan kapasitas SIKT merupakan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip. Yang bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Kebutuhan peningkatan kapasitas tercermin dari kondisi UMKM di Kota Balikpapan yang sebagian besar masih berada pada tahap awal pengembangan. Pengembangan SIKT dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti rumah produksi, jaringan listrik, instalansi air bersih, gudang dan *cold storage* yang mulai beroperasi pada tahun 2024. Sentra ini diperuntukkan bagi UMKM yang telah memiliki legalitas PIRT dan sertifikat halal serta membutuhkan sarana produksi yang lebih memadai dibandingkan produksi rumahan.

Gambar: II Peresmian Operasional Cold Storage



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Selain SIKT, Pemerintah Kota Balikpapan juga telah mengembangkan beberapa sentra lain, salah satunya Sentra Industri Kecil Somber, Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Barat, yang befokus pada produksi dan pengolahan tahu-tempe. Sentra tersebut memiliki luas sekitar 9 hektar dengan 94 rumah produksi, sehingga menjadi salah satu sentra terbesar di Kota Balikpapan (Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, n.d.). Keberadaan berbagai sentra ini menunjukkan adanya orientasi penguatan kapasitas produk UMKM di Kota Balikpapan secara bertahap.

Observasi di lapangan pada tanggal 16 September 2025, menunjukkan bahwa lokasi SIKT berjarak sekitar 30 menit dari pusat Kota Balikpapan. Pada awalnya, peneliti berasumsi bahwa jarak tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pemasaran serta pemanfaatan fasilitas oleh pelaku usaha, mengingat sentra ini berfokus pada produksi makanan oleh-oleh. Namun, penjelasan yang diperoleh dari pengelola SIKT menunjukkan bahwa jarak bukan menjadi kendala utama, melainkan tingkat kesiapan usaha. UMKM yang telah memiliki kapasitas produksi besar dapat memanfaatkan sentra secara optimal, sedangkan UMKM skala mikro masih cenderung melakukan produksi dari rumah.

Salah satu contoh UMKM yang terbantu dengan keberadaan fasilitas sentra adalah Bu Tuti pemilik usaha BDS Snacks yang semula mengalami keterbatasan ruang produksi, namun setelah ditempatkan di

SIKT skala usaha nya meningkat. Temuan ini menginformasi bahwa sentra industri berperan sebagai media peningkatan kapasitas produksi bagi UMKM yang telah siap naik kelas. Temuan ini sesuai dengan konsep *capacity building* (Grindle, 1997), serta model pemberdayaan Jim Ife. mencakup tiga lingkup utama. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel III.

Tabel III. Konsep *Capacity Building*

Dimensi Peningkatan Kapasitas	Implementasi pada SIKT
Penguatan sistem	Kebijakan Perwali Nomor 12 tahun 2019, seleksi pelaku usaha, dan pengelolaan UPTD
Pengutan Struktur Organisasi	Penyediaan rumah produksi, peralatan produksi, <i>cold storage</i> , jaringan kelembagaan
Penguatan Individu	Pendampingan usaha, pelatihan peningkatan keterampilan

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Dengan demikian, peningkatan kapasitas UMKM tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha dalam mengakses, memanfaatkan, dan mengoptimalkan fasilitas tersebut.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi pelaku UMKM dalam pemanfaatan Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT) terlihat dari keterlibatan aktif pelaku usaha dalam menggunakan rumah produksi dan fasilitas pendukung yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Namun, berdasarkan penjelasan pihak pengelola UPTD SIKT, tingkat pemanfaatan fasilitas tersebut belum optimal. Informasi dari pengelola menunjukkan bahwa meskipun terdapat 24 unit rumah produksi yang dibangun, baru sekitar 21 UMKM yang terdaftar, dan hanya sekitar 10-15 unit usaha yang aktif memproduksi setiap harinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi pelaku usaha masih terbatas dan belum sesuai kapasitas sentra yang tersedia.

Tabel: III Rumah Produksi



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam pemanfaatan fasilitas SIKT masih perlu ditingkatkan. Suriani, selaku Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan dalam kunjungannya ke SIKT menerima berbagai masukan dari pelaku usaha yang menghadapi keterbatasan

modal dan kapasitas produksi yang masih kecil (Balikpapan, 2025). Salah satu contoh adalah pelaku usaha budidaya jamur tiram yang hanya mampu menghasilkan sekitar 30 kilogram per harinya. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kesadaran, melainkan juga karena kendala struktural seperti keterbatasan modal, kemampuan manajerial, dan skala produksi yang masih terbatas.

Pemerintah Kota Balikpapan telah berupaya mendorong peningkatan partisipasi pelaku UMKM melalui penyediaan infrastruktur pendukung, seperti kantor pengelola SIKT, instalasi pengelolaan air bersih (PDAM), jaringan listrik, jalan, serta pengelolaan air limbah. Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga menambahkan fasilitas penunjang berupa pembangunan gudang dan *cold storage* dengan kapasitas 80 ton untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi produk olahan (Pramesti, 2025). Penyediaan infrastruktur ini diperkuat dengan kalaborasi sejumlah OPD, antara lain melalui peluncuran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) pada 14 Februari 2025 yang tidak hanya bertujuan mendorong pola hidup sehat, tetapi juga mendorong pemasaran dan penyediaan pangan murah berbagai produk UMKM.

Kedepannya, pengembangan SIKT direncanakan melibatkan berbagai perbankan seperti Bank Mandiri, Bank Kaltimara dan Bank Indonesia, serta lembaga pengawasan ekspor seperti Loka POM dan Bea Cukai (Niken, 2025). Keterlibatan berbagai institusi tersebut diproyeksikan dapat memperkuat kesiapan UMKM dalam peningkatan kualitas produk sekaligus membuka peluang ekspor ke pasar internasional. Arah pembangunan sentra juga berorientasi pada kenaikan kelas UMKM, dari skala mikro menuju usaha yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global sesuai target pemerintah dan pengelola UPTD. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan SIKT tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan pelaku usaha dalam proses produksi, tetapi juga sebagai proses membangun ekosistem usaha yang kolaboratif dan berkelanjutan. Partisipasi ini tidak hanya menuntut kesiapan pelaku UMKM dalam memanfaatkan fasilitas, tetapi juga dukungan kebijakan, akses modal, peningkatan kapasitas manajerial, serta penguatan jaringan antar-lembaga guna mendorong terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing.

Kemandirian Perekonomiaan Masyarakat

Pemberdayaan UMKM di Kota Balikpapan diarahkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, salah satunya melalui pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritik (SIKT). Sentra ini diperuntukkan bagi UMKM yang sudah memiliki usaha berjalan di bidang pertanian dan perikanan, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana dan prasarana produksi, pelatihan, serta dukungan berupa bantuan atau kebijakan yang mendorong peningkatan pelaku usaha (Prastika, 2016). Pengaturan mengenai mekanisme pengelolaan SIKT tercantum dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pemerintah tidak bertindak sebagai pengendali usaha, melainkan penyedia dukungan yang mendorong penguatan kapasitas usaha.

Hasil koordinasi dengan UPTD SIKT menunjukkan bahwa kebutuhan operasional usaha, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga pemasaran dikelola langsung oleh pelaku UMKM. Pemerintah hanya menyediakan fasilitas produksi serta dukungan promosi seperti keterlibatan dalam pameran dan fasilitas pertemuan dengan distributor atau ritel modern. Pola fasilitas ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM diberi ruang untuk menentukan strategi usahanya sendiri, sehingga kemandirian bukan hanya bersifat

administratif, tetapi juga operasional dan pemasaran. Fasilitas rumah produksi juga dikelola secara mandiri oleh masing-masing UMKM, meskipun penerapannya dibatasi agar tidak berubah fungsi menjadi tempat tinggal. Kebijakan ini bertujuan memastikan fungsi utama sentra tetap berorientasi pada kegiatan produksi, berbeda dengan model sentra Sumber tahu-tempe yang menggabungkan tempat produksi dan hunian dalam satu lokasi. Kemandirian tersebut tidak terlepas dari pengalaman UMKM di SIKT saat pandemi COVID-19 melanda. Pada masa awal operasional sentra, pelaku usaha mengalami penurunan produksi cukup dratis, namun tidak ada UMKM yang gulung tikar. Sebagian unit usaha memang tidak beroperasi sementara, namun setelah kondisi ekonomi membaik, produksi berangsur kembali meningkat. Ketahanan tersebut menjadi indikator terbentuknya kapasitas adaptif yang mendukung kemandirian ekonomi pelaku usaha.

Seiring pemulihan usaha dan meningkatnya kapasitas produksi, sejak tahun 2024 SIKT mulai menerapkan sistem sewa fasilitas sebagai bentuk transisi menuju kemandirian penuh. Pada periode awal (hingga pandemi), rumah produksi digunakan secara gratis sebagai bentuk dukungan bagi UMKM tahap awal. Namun, perubahan kondisi usaha mendorong pemerintah menerapkan tarif sewa, yaitu rumah produksi sebesar Rp250.000 per bulan, gudang penyimpanan Rp900.000 per bulan, dan penyewaan *cold storage* sebesar Rp30 juta per bulan untuk tiga ruangan yang tersedia. Selain itu, diberlakukan pula tarif penyimpanan harian dan pendinginan produk berdasarkan volume dan suhu penyimpanan. Skema sewa ini menunjukkan pergeseran model pemberdayaan dari bantuan langsung menuju mekanisme pembiayaan mandiri yang mendorong disiplin usaha dan efisiensi produksi. Dengan demikian, implementasi pemberdayaan melalui SIKT memperlihatkan bahwa perkembangan yang signifikan dari ketergantungan menuju kemandirian ekonomi UMKM. Sentra tidak hanya menyediakan dukungan sarana fisik, tetapi juga memainkan peran sebagai instrumen transisi menuju kemandirian usaha, di mana pelaku UMKM berperan aktif dalam mengelola produksi, pemasaran, dan perluasan jaringan usaha secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Pengembangan Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT) di Kota Balikpapan masih menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya sebagai pusat pemberdayaan ekonomi lokal. Peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan, penyediaan fasilitas produksi, dan pendampingan teknis telah memberikan dampak positif bagi sebagian pelaku UMKM. Namun demikian, pemerataan manfaat belum sepenuhnya tercapai, terutama pada UMKM skala mikro yang masih terbatas dalam akses produksi dan kemampuan manajerial. Partisipasi pelaku usaha menunjukkan kecenderungan aktif, tetapi pemanfaatan fasilitas sentra belum optimal karena masih banyak pelaku usaha yang memilih berproduksi di rumah. Aspek pemasaran, inovasi produk, serta keberlanjutan sistem sewa bangunan menjadi faktor yang turut mempengaruhi tingkat kemandirian ekonomi pelaku UMKM. Di sisi lain, peran UPTD SIKT sebagai pengelola sentra sudah berjalan, tetapi masih membutuhkan peningkatan dalam manajemen fasilitas, pengawasan, dan efektivitas kebijakan teknis yang ada. Keberhasilan pengembangan SIKT tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia, kualitas manajemen, konsistensi kebijakan, dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi UMKM, dan evaluasi kebijakan sewa perlu dilakukan untuk memastikan sentra dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, lokasi penelitian terbatas hanya pada Sentra Industri Kecil Teritip, sehingga hasil temuan belum dapat digeneralisasi ke sentra industri lain dengan kondisi dan karakteristik berbeda. Kedua, jumlah informan yang terbatas pada pelaku usaha, pengelola sentra, dan beberapa pihak terkait belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh dinamika dan perspektif stakeholder yang lebih luas. Ketiga, rentang waktu penelitian yang relatif singkat membatasi analisis terhadap perubahan jangka panjang, terutama terkait efektivitas kebijakan sewa dan perkembangan kapasitas UMKM. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan multi-lokasi, melibatkan jumlah informan yang lebih beragam, serta memperpanjang periode observasi guna memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai pengembangan sentra industri dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto, I., & Nurjanah, N. (2016). Strategi Klaster Industri Menghadapi Pasar Global. *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 85–144.
- Alexander, H. B. (2024). *IKN Dorong Lonjakan Pesanan Amplang di Sentra Industri Kecil Teritip*. Kompas.Com. <https://share.google/Nw95eXyaVFUR3e400>
- Arifin, A. R. (2021). Pola Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. In *Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Polopo)*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2024). Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Kalimantan Timur 2023. In *Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur* (Vol. 5, pp. 1–258).
- Balikpapan, D. (2025). *Sentra Industri Kecil Teritip, Harapan Baru untuk Perekonomian Balikpapan Timur*. Swararepublika.Com. <https://swararepublika.com/dprd-balikpapan/3283-sentra-industri-kecil-teritip,-harapan-baru-untuk-perekonomian-balikpapan-timur.html>
- Dina, P. K., Syukur, A., & Makleat, N. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Prgoram Pelatihan Menjahit Dalam Telaah Teori Jim Ife (Studi Kasus Pada Panti Sosial Karya Wanita, Naibonat) Kecamatan Kupang Timur. *Jurnal Prodi PLS Universitas NUa Cendana*, 3(2), 21–24.
- Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian. (n.d.). *Sentra Industri Kecil Teritip*. Sik.Teritip.Com. <https://share.google/BDnmpbBI1ilgGKTr6>
- Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian. (2023). *Katalog Produk Sentra Industri Kecil Teritip*. Sik-Teritip.Com. <https://share.google/7ZSUJ63vx2Sp3CwmC>
- Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan. (n.d.). *Sentra Industri Kecil Somber*. Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian Kota Balikpapan. <https://share.google/Z487bAr72qpeRdHaA>
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, K. dan U. P. K. T. (2019). Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023. In *Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur* (pp. 1–121).
- Dippoprameswari, E., & Pujiyanto, W. E. (2024). Optimalisasi Ketertiban Masyarakat: Pemberdayaan UMKM Melalui Inisiatif Pelayanan Terdedikasi. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(1).

- Diskominfo. (2021). *Pembangunan Rumah Produksi Sentra Teritip Mencapai 50 Persen*. Web.Balikpapan.Go.Id. <https://share.google/joW2LGChPzM4A33cY>
- Indriyani, L., Zaini, M., Hartono, T., Paselle, E., & Surya, I. (2025). Implementasi Kebijakan Pengembangan Sentra Industri Kecil Teritip Kota Balikpapan. *GOVERNACE: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 15(02), 94–102.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia (Siaran Pers)*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://share.google/DTrrmMUqg5oE3SpCu>
- Kutanegara, D. R. & P. M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Cagar Budaya. *Jurnal Tata Kelola Seni*, 5(1), 50–65.
- Muhammad, H. (2025). *DKUMKMP Kota Balikpapan Sebutkan Sudah Ada 486 Pelaku UMKM yang Sudah Dikurasi*. Gerbangkaltim.Com. <https://share.google/OntgfBPQTtENDtoY9>
- Nashuha, T. A. (2025). Pemberdayaan UMKM masyarakat melalui Festival Culinary Night: Berbasis pemberdayaan masyarakat di Dusun 01 Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. In *Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Jati Bandung*.
- Niken. (2025). *Wali Kota Launching Germas Teritip Di SIKT, Hiddupkan UMKM Di Balikpapan Timur*. Beritakaltim.Co. <https://share.google/efuXbUjv0uuhgqu35>
- Nurhayati, S., Maulana, S., Ramadhanti, M., & Suherman, I. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pendampingan Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM Desa Cibalung. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 269–276. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i3.6619>
- Nurmiyati, N., Zuhriyati, E., Noor, M., Yogyakarta, U. M., Mulawarman, U., & Merah, B. (2020). Desentralisasi Politik dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal MODERAT*, 6(2), 376–396.
- Pramesti, R. D. (2025). *Sentra Industri Kecil Teritip: Pilar Ekonomi Baru di Balikpapan Timur*. Kompasiana.Com. <https://share.google/3q5z9kXHQ0BA7p8T9>
- Prastika, H. C. (2016). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan. In *Doctoral dissertation, Universitas Airlangga*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN SENTRA INDUSTRI KECIL TERITIP*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/188082/perwali-kota-balikpapan-no-12-tahun-2019>
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri* (pp. 1–249).
- S.Grindle, M. (1997). Pengembangan Kapasitas Masyarakat Partisipatif: Studi Implementasi Saemaul Undong Di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 4(1), 1–13.
- Safira, P. B. K. dan. (2019). Analisa Kesiapan Infrastruktur Kawasan Industri di Kota Semarang. In *Doctoral dissertation, Undip Vokasi*.

- Setiawati, I. B. (2023). *Strategi Pengembangan Sentra Melalui Pendekatan Sumber Daya Lokal*. GEMA Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian Edisi 77/22. <https://share.google/tlOKSZYv9yXrKk9DZ>
- Setyawan, A. A., Desembrianita, E., & Santoso, M. H. (2025). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494–1503.
- Suaib., & Zuhijjah, A. N. (2024). *Pembangunan dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*. Inteligencia Media.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Voges, M., Kerebungu, F., & Mandey, L. C. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan di Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang. *Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1–12.
- Wahid, J., Malik, D. A., Jauchar, B., & Nurmiyati, N. (2024). CSR Program PT . Pertamina Hulu Mahakam Towards the Empowerment of Farmer Women Groups in Muara Sembilang Village , Kutai Kartanegara Regency. *International Journal of Demos*, 6(2), 108–120.
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPP*, 3(2), 147–153.

PROFIL SINGKAT

Desta Anisa, lahir pada 17 Desember 2006. Tempat kelahiran di Balikpapan, Kalimantan Timur. Menempuh pendidikan dasar di SDN 017 Balikpapan Timur, dilanjutkan ke SMPN 13 Balikpapan Timur, dan SMAN 7 Balikpapan Timur. Saat ini sedang menempuh perkuliahan jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur.